

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sekolah memiliki potensi untuk menjadi lingkungan belajar di mana anak-anak dapat memperoleh dan mengasah disposisi, keterampilan, dan informasi yang diperlukan untuk menjadi pemikir kritis yang efektif. Menurut UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah membantu peserta didik tumbuh menjadi "manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. dan bertanggung jawab," antara lain. Jika sekolah dikelola dengan baik, maka mungkin kita dapat mencapai tujuan pendidikan nasional kita. Penganggaran yang cerdas untuk sekolah akan memastikan bahwa semua mode pembelajaran didukung.

Pasal 46 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yang mengatur alokasi sumber daya keuangan untuk sekolah, menetapkan bahwa pemerintah federal, pemerintah negara bagian dan kota, dan masyarakat semua memiliki peran untuk bermain dalam menyediakan uang untuk sekolah. Pendapatan sekolah dapat berasal dari pemerintah, perusahaan sekolah otonom, orang tua siswa, atau sumber lain sepanjang tidak melanggar Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2000 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sekolah-sekolah di seluruh negeri praktis mulai buruk setelah otonomi daerah ditetapkan, dengan masalah administrasi, PBM, dan infrastruktur fisik. Hal ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan dana yang cukup untuk operasional sekolah.

Untuk mendukung program wajib belajar sembilan tahun pemerintah, inisiatif Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibuat pada tahun 2005. Dalam masa pertumbuhannya, BOS berfungsi sebagai program bantuan pemerintah yang dimaksudkan untuk menutupi hal-hal seperti sewa dan utilitas untuk sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru sebagai staf. Tujuan dari program BOS adalah untuk memudahkan dukungan keuangan daerah untuk sekolah. Peluncuran BOS di sekolah menengah dimulai pada tahun 2013 setelah pelaksanaan percontohan BOS.

Pengelolaan BOS dilakukan oleh tim pengelola BOS di tingkat satuan pendidikan dan diawasi oleh tim BOS. Kepala Sekolah membawahi Tim Pengelola BOS di tingkat satuan pendidikan, yang juga meliputi bendahara BOS, penyelenggara dapodik, dan perwakilan orang tua siswa di luar komite sekolah yang dipilih untuk menjabat.

Tugas dan tanggung jawab bendahara BOS mulai dari menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang meliputi rencana penerimaan dan rencana penggunaan dana, membuat laporan berkala atas realisasi penggunaan dana, menyelenggarakan pembukuan, dan menyampaikan melapor ke dinas pendidikan. digabungkan dengan pelaporan realisasi dana BOS dan perolehan aset menggunakan dana tersebut melalui website BOS.

Luasnya tugas dan kewajiban Bendahara BOS seringkali membuat keterlambatan pengiriman laporan baik ke Dinas Pendidikan maupun online ke sistem pelaporan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara nasional, kinerja Bendahara BOS masih jauh dari harapan terkait ketepatan waktu pelaporan, serta penatausahaan BOS pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Lampung Tengah. Sekolah memiliki potensi untuk menjadi lingkungan belajar di mana anak-anak dapat memperoleh dan mengasah disposisi, keterampilan, dan informasi yang diperlukan untuk menjadi pemikir kritis yang efektif. Membantu peserta didik tumbuh menjadi "manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. dan bertanggung jawab," antara lain.

Jika sekolah dikelola dengan baik, maka mungkin kita dapat mencapai tujuan pendidikan nasional kita. Manajemen keuangan yang efektif merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan sekolah dan pengajaran mereka. Penganggaran yang cerdas untuk sekolah akan memastikan bahwa semua mode pembelajaran didukung. Pasal 46 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yang mengatur alokasi sumber daya keuangan untuk sekolah, menetapkan bahwa pemerintah federal, pemerintah negara bagian dan kota, dan masyarakat semua memiliki peran untuk bermain dalam menyediakan uang untuk sekolah. Pendapatan sekolah dapat berasal dari pemerintah, perusahaan sekolah

otonom, orang tua siswa, atau sumber lain sepanjang tidak melanggar Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2000 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Sekolah-sekolah di seluruh negeri praktis mulai buruk setelah otonomi daerah ditetapkan, dengan masalah administrasi, PBM, dan infrastruktur fisik. Hal ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan dana yang cukup untuk operasional sekolah.

Untuk mendukung program wajib belajar sembilan tahun pemerintah, inisiatif Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibuat pada tahun 2005. O

Berdasarkan data pra survey yang dihimpun dari Tim BOS SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada bulan November tahun 2021, kinerja bendahara BOS SMK masih kurang optimal. Hal ini di tandai dengan capaian pelaporan baik secara *online* maupun secara fisik. Berdasarkan peraturan yang berlaku, pelaporan secara online pada tahun sebelumnya merupakan dasar dari penyaluran dana BOS pada tahun berjalan. Dengan demikian sekolah yang belum melaporkan sesuai waktu yang ditentukan akan mendapatkan sanksi berupa penundaan pencairan dana BOS pada tahun berjalan.

Table 1. Tingkat Ketercapaian Pelaporan BOS

No	Aspek Kinerja	Target	Capaian	Kesenjangan
1	Pelaporan online	100 %	64 %	36 %
2	Pelaporan fisik	100 %	15 %	85 %
3	Pelaporan aset BMD	100 %	40 %	60 %
Rerata			39,6%	60,3%

Sumber data: Diolah dari Tim BOS SMK Disdikbud Provinsi Lampung

Bendahara BOS bekerja harus berdasarkan peraturan yang ada sehingga bendahara dituntut untuk lebih memahami segala aktivitas yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan secara hati-hati dan bertanggung jawab, seperti pembayaran beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Dalam hal pemeriksaan monitoring dan evaluasi baik oleh dinas pendidikan maupun inspektorat, seringkali masih didapati kekurangan pelaporan yang bersifat administratif maupun secara teknis.

Kurangnya pemahaman terkait perpajakan juga sering menjadi hambatan tersendiri sehingga banyak ditemui oleh pemeriksa proses maupun jumlah objek pajak yang belum terlaksana dengan benar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya temuan inspektorat berkaitan dengan masalah pajak.

Berkaitan dengan temuan-temuan tersebut di atas maka kinerja bendahara BOS SMK di Kabupaten Lampung Tengah menjadi fenomena yang sangat menarik untuk diteliti. Selain itu hampir setiap tahun anggaran sering terjadi pergantian bendahara di beberapa Sekolah, dan bendahara BOS SMK di Kabupaten Lampung Tengah memiliki kompetensi bendahara yang berbeda-beda. Hanya sedikit bendahara sekolah yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai.

Pengetahuan, kemampuan, dan disposisi seseorang semuanya berkontribusi pada tingkat kompetensi mereka. Kemampuan untuk melakukan kewajiban seseorang secara efektif dibantu oleh kompetensi. Jika bendahara BOS berkompeten, ia akan mampu menjalankan tugasnya dan mengatasi hambatan apa pun yang dihadapinya. Bendahara yang memenuhi syarat diharapkan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mengapa. Hasil akan meningkat dengan bendahara yang kompeten.

Efektivitas bendahara juga dapat ditingkatkan dengan pemahaman yang menyeluruh tentang tanggung jawab utama posisi tersebut. Jika bendahara tidak terbiasa dan mahir dalam tanggung jawab utamanya, dia mungkin tidak dapat membantu perusahaan beroperasi dengan lebih baik. Bendahara sering melakukan pekerjaan mereka tanpa sepenuhnya memahami kewajiban dan ruang lingkup wewenang mereka. Kabupaten Lampung Tengah tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia; setiap tahun anggaran, bendahara distrik biasanya berpindah tangan. Akibatnya, bendahara yang masuk dapat salah informasi tentang tanggung jawab utamanya.

Keluaran bendahara BOS SMK sangat dipengaruhi oleh tingkat dorongan intrinsiknya. Tingkat kegembiraan, keinginan, dan kemauan seseorang di tempat kerja, serta sejauh mana mereka berkontribusi pada keberhasilan mencapai tujuan bersama, semuanya sangat dipengaruhi oleh tingkat motivasi mereka (yang mungkin berasal dari sumber internal dan eksternal) . Motivasi adalah mekanisme internal yang menjelaskan kemauan individu, rasa tujuan, dan kemampuan untuk bertahan dengan tugas sampai selesai. Seseorang dimotivasi oleh kebutuhan mereka untuk bertahan hidup, maju, dihormati, dan diakui. Pentingnya motivasi di tempat kerja tidak dapat dilebih-lebihkan. Tidak ada organisasi yang dapat berhasil tanpa seorang bendahara yang memiliki dorongan yang sama untuk sukses yang mendorong anggota lainnya.

Berdasarkan data dan fenomena tersebut di atas peneliti termotivasi untuk mengkaji seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kinerja bendahara BOS SMK se Lampung Tengah dan seberapa besar pengaruh motivasi terhadap kinerja bendahara BOS SMK di Kabupaten Lampung Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi bendahara berpengaruh terhadap kinerja bendahara BOS SMK Se-Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja bendahara BOS SMK Se-Kabupaten Lampung Tengah?

3. Apakah kompetensi bendahara dan motivasi kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja bendahara BOS SMK Se-Kabupaten Lampung Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. mengetahui apakah kompetensi bendahara BOS SMK di Kabupaten Lampung Tengah berpengaruh terhadap kinerja jabatan tersebut; dan menarik kesimpulan tentang sifat efek tersebut.
2. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui apakah tingkat motivasi intrinsik bendahara BOS SMK mempengaruhi produktivitas kerjanya di Kabupaten Lampung Tengah.
3. Tujuan ketiga adalah untuk mengetahui apakah kinerja bendahara BOS SMK di Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh kompetensi bendahara dan motivasi kerja secara terpisah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti.  
Penelitian ini dapat menjelaskan hubungan antara tingkat kompetensi dan motivasi Bendahara BOS dengan efektivitasnya pada SMK di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Kalangan Akademisi  
Mempelajari dampak kompetensi dan motivasi terhadap kinerja Bendahara BOS di SMK di Kabupaten Lampung Tengah akan membantu memandu studi masa depan dan memberikan referensi yang berguna bagi para sarjana saat ini.
3. Bagi Sekolah dan Pemerintah  
Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas bendahara BOS sekolah dan Pemerintah Provinsi Lampung dengan meningkatkan sumber daya atau semua elemen yang mempengaruhi terkait dengan pengelolaan keuangan, proyek ini berusaha untuk memperbaiki semua sumber daya di daerah ini.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum tentang bagaimana kompetensi bendahara dan motivasi kerja berkontribusi terhadap kinerja bendahara BOS SMK di Kabupaten Lampung Tengah secara keseluruhan. Berikut adalah ruang lingkup penelitian ini:

1. Sifat penelitian : Kuantitatif
2. Objek Penelitian : Bendahara BOS SMK Se-Kabupaten Lampung Tengah
3. Tempat penelitian : SMK Se-Kabupaten Lampung Tengah
4. Waktu Penelitian : Tahun Pelajaran 2021/2022